

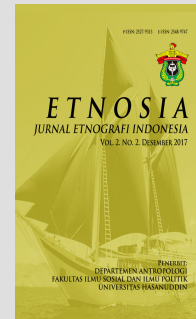
ETNOSIA: JURNAL ETNOGRAFI INDONESIA

VOLUME 3 EDISI 2, DESEMBER 2018

P-ISSN: 2527-9319, E-ISSN: 2548-9747

Terakreditasi Ristekdikti No. 21/E/KPT/2018

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-4.0 International License



Mereka Yang Tidak Dibayar Tinggi: Ibuisme, Taman Kanak-kanak, dan Kampung di Indramayu

Mochammad Arief Wicaksono

Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia.

Email Coresponden: ariefwicaksono.m@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Housewives; ibuism;
kampung; moral burden;
community pressure.

How to cite:

Wicaksono, M.A., (2018).
Mereka Yang Tidak Dibayar
Tinggi: Ibuisme, Taman
Kanak-kanak, dan Kampung
di Indramayu. *Etnosia:
Jurnal Etnografi Indonesia*,
3(2), 121-140.

DOI:

10.31947/etnosia.v3i2.3612

ABSTRACT

The ideology of state-ibuism has always been interwoven with how the New Order regime until nowadays government constructing the "ideal" role of women in the family and community through the PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) organization. However, in Cangkring Village, Indramayu, the ideology of ibuism works not because of the massive government regulating the role of women through the PKK organization, but it is possible because of the structure of the kampung community itself. Through involved observations and in-depth interviews about a kindergarten in the village, a group of housewives who dedicated themselves to teaching in kindergarten were met without getting paid high. From these socio-cultural phenomenons, this paper will describe descriptively and analytically that housewives in the Cangkring village are willing to become kindergarten teachers because of their moral burden as part of the warga kampung and also from community pressure from people who want their children to be able to read and write.

Copyright © 2018 ETNOSIA. All rights reserved.

1. Pendahuluan

"Guru-guru TK Intan Bahari Alhamdulillahada penambahan guru baru yang mau membantu kami. Dari kampung Cangkringnya *ajakak*, yang satu suaminya lagi di Jepang, yang satu baru pulang dari Singapura, Alhamdulillah mereka merasa terpanggil untuk bantu mengajar".

Itulah pesan yang saya terima dari Bu Imah, kepala Taman Kanak-kanak (TK) Intan Bahari melalui *Whatsapp* setelah kurang lebih satu setengah bulan saya meninggalkan lapangan penelitian etnografi di Desa Cangkring, Indramayu. Dengan bertambahnya dua guru baru, kini jumlah guru di TK yang memiliki dua kelas (dua rombongan belajar) tersebut berjumlah lima orang. Ketika

melakukan wawancara mendalam, Bu Imah mengatakan bahwa jika tujuan menjadi guru adalah untuk mencari uang, maka bukan di sini (di TK Intan Bahari) tempatnya. Itulah mengapa ungkapan ‘merasa terpanggil untuk bantu mengajar’ pada pesan Bu Imah di atas penting untuk digarisbawahi. Dengan kata lain, para ibu rumah tangga yang menjadi guru di TK Intan Bahari tersebut tidak mendapat bayaran rutin perbulan dengan jumlah yang tinggi, bahkan terkadang mereka juga tidak menerima bayaran sama sekali. Sebagai kepala TK, Bu Imah tidak hanya bersedia mengajar secara sukarela dengan sedikit atau tanpa bayaran, tetapi juga merelakan sebagian uang rumah tangga yang diperoleh dari suaminya untuk keperluan atau biaya operasional TK. Bahkan, bayaran yang diperoleh guru-guru di TK Intan Bahari sebenarnya berasal dari ‘uang pribadi’ keluarga Bu Imah.

Temuan ini menarik karena pertama membedakan dengan temuan saya terkait topik serupa, yaitu ibuisme yang lekat dengan “kesukarelaan” kaum perempuan di lingkungan kampung-perkotaan Malang, Jawa Timur. Ibu-ibu rumah tangga di sebuah perkampungan-perkotaan Malang, Jawa Timur bersedia menjadi kader Posyandu karena setiap tiga bulan sekali mereka menerima insentif yang rutin dan itu membuatnya harus mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh lembaga di tingkat atasnya, yaitu kelurahan dan kota. Alasan kedua yang menjadikan temuan ini menarik adalah ibu-ibu rumah tangga yang bersedia menjadi guru di TK/PAUD tersebut bukan bagian dari organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK selama ini menjadi bagian penting dalam kajian-kajian mengenai ibuisme dalam kaitannya dengan negara dan konstruksi rezim Orde Baru terhadap kaum perempuan dewasa (Wicaksono, 2017). Dari gambaran singkat mengenai fenomena di lapangan, serta dua alasan penting yang menjadikan fenomena tersebut menarik untuk diteliti, tulisan ini difokuskan untuk menjawab mengapa ibu-ibu rumah tangga di Desa Cangkring tersebut bersedia dan sukarela menjadi guru di TK/PAUD dengan sedikit atau bahkan tanpa bayaran sama sekali? Mengapa kesukarelaan ibu-ibu rumah tangga tersebut muncul padahal beberapa dari mereka bukan merupakan bagian dari PKK? Apa yang membedakan pembahasan mengenai ibuisme pada masyarakat kampung-pedesaan dan perkotaan?

Istilah *ibuisme* pertamakali ditulis oleh Madelon Djajadiningrat sebagai ideologi yang mendukung setiap tindakan yang diambil oleh ibu yang mengurus keluarga, kelompok, kelas, perusahaan, atau negara tanpa menuntut kekuasaan atau prestise sebagai imbalan. Pengertian ibuisme menurut Djajadiningrat memuat konsep priyaisasi, yaitu proses transformasi dan penyebaran nilai-nilai tradisional (Jawa) untuk melanggengkan pembangunan (Djajadiningrat, 1987: 44). Di masa Orde Baru, implemementasi ideologi ibuisme paling dapat terlihat dalam pertemuan-pertemuan PKK dan Posyandu. Mereka yang disebut “kader”

PKK atau Posyandu adalah perempuan yang sudah dewasa atau yang telah menikah. Perempuan dewasa tersebut secara otomatis tergabung dalam PKK. Dalam hal ini, kaum perempuan, terutama para istri pejabat daerah setempat (misalnya istri ketua RW atau istri lurah) tidak hanya bertanggung jawab untuk membentuk keluarga yang ideal, tetapi juga menyejahterakan masyarakatnya sendiri (*self-support community*).

Berdasarkan penelitian etnografi tentang ibuisme sebelumnya, misalkan saja penelitian yang banyak dilakukan oleh Newberry pada tahun 90-an di Yogyakarta mengenai PKK, kesukarelaan kaum perempuan cenderung dilahirkan karena kontrol rezim pemerintah pusat yang cukup kuat. Antlov (2002) dalam bukunya *Negara dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal* menunjukkan bahwa desa dan organisasi masyarakat pada era Orde Baru bersifat korporatis. Artinya negara memiliki kontrol yang kuat terhadap warga negara. Negara juga melakukan praktik hegemoni dan dominasi terhadap perkumpulan kewargaan, khususnya perempuan ibu rumah tangga, sehingga pantas saja orang desa, termasuk ibu-ibu akan berkerja aktif untuk menjalankan kegiatan PKK, Posyandu, dan sebagainya dengan semangat menjalankan pembangunan. Penetrasi program pemerintah dan ideologi yang diproduksi oleh negara ke dalam kesadaran warga negara di komunitas kampung, yang tipikal di perkotaan Indonesia, dimungkinkan berkat keberadaan keluarga. Penetrasi program pemerintah ke dalam masyarakat melalui keluarga dan rumah tangga lebih diperkuat dengan adanya peran kaum perempuan ibu rumah tangga. Dalam fungsi seperti ini perempuan di satu sisi telah didomestikasi sekaligus juga ditegaskan otonominya dalam aspek sosial-budaya-politik, namun sebenarnya semu karena pengaturan negara. Ini menjelaskan mengapa negara berkepentingan untuk mengatur kaum perempuan.

Jika disederhanakan, asumsi bahwa dengan tiadanya rezim Orde Baru maka ideologi ibuisme memudar, tidak sepenuhnya tepat. Kenyataannya, di berbagai tempat PKK tetap aktif dan tetap saja meletakkan kaum perempuan ibu rumah tangga pada posisi yang penting. Penelitian yang saya lakukan pada ibu-ibu rumah tangga yang tergabung dalam Posyandu di Malang menunjukkan bahwa “kesukarelaan” ibu-ibu untuk melayani kesehatan masyarakat dapat terjadi karena adanya kebijakan pemberian insentif dari pemerintah untuk mereka, sehingga konsep dominan yang melandasi ibuisme pada ibu-ibu di Malang ini bukan saja patronase melainkan resiprositas. Secara empirik di masa demokratisasi ini setiap perempuan dewasa tidak lagi memiliki perasaan untuk wajib bergabung dengan PKK.

Penelitian Newberry dalam dasawarsa terakhir tentang pendidikan anak usia dini dan kaitannya dengan perempuan sebenarnya menunjukkan corak yang berbeda, namun secara implisit masih menunjukkan “pola lama”, yaitu keterkaitannya dengan negara. Newberry mengungkapkan mengenai perkembangan program pendidikan anak usia dini yang masif dilakukan di Yogyakarta sejak tahun 2000-an. Dalam hal ini, selain negara dan masyarakat, pihak lain yang menjadi agen penting adalah lembaga donor internasional. Dukungan yang kuat dari kaum perempuan ibu rumah tangga di Yogyakarta terhadap program pendidikan anak usia dini menjadi hal yang menarik dalam kajian Newberry. Fenomena tersebut mencerminkan dua karakteristik pembangunan masyarakat di era reformasi: Pertama, optimisme demokrasi yang memunculkan potensi bagi masyarakat kelas menengah untuk berkembang. Kedua, kembalinya peran dan status perempuan sebagai kelas pekerja dalam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat (Newberry 2017).

Peranan kaum perempuan-pekerja dalam pendidikan kanak-kanak tidak bisa dilepaskan dari peranan mereka dalam perkumpulan PKK. Merujuk Mamdani (dalam Newberry2017) PKK meletakkan perempuan ideal adalah mereka yang mendukung suami dan komunitas atau masyarakatnya melalui peranan mereka dalam mereproduksi nilai-nilai. Perempuan dalam hal ini berada di tengah-tengah masyarakat yang “membangun dirinya sendiri”. Dalam hal ini tentu saja mereka tidak dibayar. Newberry menceritakan pengalamannya melakukan penelitian tentang PAUD di Yogyakarta. Tidak ada satupun guru di PAUD tersebut pernah mendapat pelatihan tentang PAUD. Guru-guru itu juga mengaku tidak mendapat bayaran (dan tertawa atas pernyataannya). Namun demikian, para guru-guru itu menjalin relasi secara aktif dengan pengurus RT, PKK, dan Dasawisma. Proses pemberdayaan banyak dibebankan ke masyarakat lokal sebagai bentuk dari upaya mewujudkan masyarakat yang mandiri. Kemandirian untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera ini lagi-lagi menggunakan kaum perempuan sebagai “pengganti biaya” membangun masyarakat tersebut.

Model penggunaan tenaga perempuan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri dalam konteks PAUD sebenarnya sama dengan penggunaan tenaga mereka dalam mewujudkan masyarakat yang sehat melalui Posyandu. Itu semua, pada masa Orde Baru adalah dengan sedikit atau bahkan tanpa uang. Organisasi perempuan di masyarakat lokal yang paling populer bukan lain adalah PKK. Model kepemimpinan PKK tidak ada bedanya dengan organisasi yang patriarki. Istri kepala daerah atau kepala kelurahan adalah ketua dari PKK di daerah tersebut. Setiap bulan PKK selalu mengadakan pertemuan untuk membahas banyak hal yang kebanyakan merupakan “pesan”

atau “mandat” dari pemerintahan di atasnya. Agendanya tak lain adalah program pemberdayaan untuk masyarakat mereka sendiri.

Tulisan-tulisan tentang ibuisme secara tidak langsung menyiratkan suatu suasana “subordinasi” terhadap kaum perempuan. Tulisan-tulisan ini berbeda, misalkan, yang terlihat dari tulisan Shiraishi (1997) *The Young Heroes: Indonesian Family in Politics* tentang bapakisme. Shiraishi memperlihatkan secara cukup jelas, bagaimana Soeharto sebagai “bapak” dari bangsa Indonesia dan mewakili kaum laki-laki yang cenderung pada posisi superordinat, terutama terhadap kaum perempuan. Tulisan Suryaningsi, juga menarik untuk disimak. Ia secara tidak langsung mendeskripsikan dan menjelaskan bagaimana ideology ibuisme juga bekerja di ranah pertambangan Sorowako, Sulawesi Selatan yang identic dengan dunia laki-laki. Suryaningsi berpendapat bahwa kaum perempuan yang terlibat dalam dunia pertambangan (para *ranger pink*) mampu menyeimbangkan kegiatannya di pertambangan sebagai dunia kerja dan dunia domestic atau rumah tangga (Suryaningsi, 2017)

Meskipun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik ibuisme sebelumnya (Djadjadingrat: 1987, Antlov: 2002, Newberry: 2013) tidak secara eksplisit menyatakan bahwa fokus pembahasan mereka tentang ibuisme, kita dapat menangkap pola bahwa ibuisme selalu berkelindan dengan konstruksi negara. Dimulai dari warisan konstruksi Orde Baru terhadap perempuan dan dilanjutkan hingga masa reformasi sekarang ini, argumentasi mereka pada satu sisi menyiratkan bahwa peran negara memang tidak bisa dilepaskan dari semua penjelasan mengenai ibuisme. Kaum perempuan mau tidak mau menjadi objek hegemoni dari negara. Bukankah menurut Corrigan (dalam Newberry 2013: 30) bahwa rahasia negara adalah cara negara bekerja dalam diri kita tanpa disadari? Namun demikian, penjelasan yang selalu meletakkan negara sebagai “penyebab utama” dalam dikonstruksikannya dan dilakukannya posisi ideal perempuan, menafikan kaum perempuan ibu rumah tangga itu sendiri sebagai subjek, aktor yang aktif bahkan manipulatif dalam menjalani kehidupannya. Mengingat, bahwa fakta di Desa Cangkring peran negara melalui PKK tidak terlalu tampak hadir secara signifikan, seperti yang saya jelaskan dalam sub bab berikutnya. Tulisan ini secara deskriptif dan analitis bertujuan untuk mengajukan argument bahwa ideology ibuisme tetap bekerja di Desa Cangkring, Indramayu meskipun negara melalui PKK tidak terlalu efektif bekerja di tengah-tengah masyarakat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Cangkring, kecamatan Cantigi, kabupaten Indramayu dengan menggunakan metode kualitatif-etnografi dengan beberapa

teknik, yaitu wawancara mendalam dengan para ibu rumah tangga di Desa Cangkring yang bersedia menjadi guru di taman kanak-kanak dengan bayaran yang tidak tinggi dan para ibu rumah tangga orang tua dari murid-murid taman kanak-kanak. Selain wawancara mendalam, tulisan deksriptif ini didapat juga dari pengamatan terlibat dalam kelas taman kanak-kanak dan interaksi langsung dengan warga kampung. Analisis data dilakukan dengan membandingkan kajian-kajian serupa yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya (*comparative studies*) untuk membandingkan polanya, yaitu antara pola ibuisme berbasis negara dengan ibuisme berbasis struktur kampung.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

- **Desa Cangkring: Kaum Perempuan, TK, dan Kampung**

Ada dua lembaga pendidikan kanak-kanak di Desa Cangkring yang menjadi lokasi penelitian saya, yaitu TK Intan Bahari dan PAUD Mutiara Bahari. TK Intan Bahari terletak di Blok Karang Kaji, sedangkan PAUD Mutiara Bahari terletak di Blok Rinteng, demikian juga dengan asal murid-muridnya. TK Intan Bahari adalah lembaga pendidikan kanak-kanak yang semula didirikan oleh Bu Imah, seorang ibu rumah tangga mantan tenaga kerja wanita berusia 45 tahun. TK Intan Bahari memiliki dua kelas atau dua rombongan belajar, yaitu kelas A dan kelas B. Kelas A berisi anak-anak berusia antara 3-4 tahun, sedangkan kelas B berisi anak-anak berusia 5-6 tahun. Ketika saya melakukan penelitian, di TK Intan Bahari terdapat tiga orang guru. Satu guru diantaranya, Bu Nur, terpaksa tidak bisa sering masuk karena kondisi kesehatannya yang belum sepenuhnya membaik. Bu Nur, mengidap penyakit kelenjar getah bening. Setiap harinya, setidaknya ada dua orang guru yang datang untuk mengajar di TK tersebut. Satu guru, Bu Imah, mengajar di kelas A, sementara guru yang lain mengajar di kelas B. Jumlah murid di TK Intan Bahari adalah 43 orang. 20 murid di kelas A dan 23 murid di kelas B.

Ibu-ibu orang tua atau nenek dari anak-anak yang TK di sana tidak sekadar menunggu di luar. Banyak dari mereka juga ikut ke dalam ruang kelas dan duduk di samping anak masing-masing. Jadi, meskipun jumlah anak di kelas A adalah 20 murid, namun ada 40 kursi. Tujuan ibu-ibu atau nenek dari anak-anak ikut masuk ke dalam kelas adalah untuk membantu dan mengawasi anak atau cucu mereka dalam proses belajar. Akibatnya, suasana kelas menjadi riuh karena tak jarang setiap anak yang melakukan kesalahan, anak tersebut mendapat "teriakan teguran" dari ibu atau neneknya. Ada juga ibu-ibu yang menunggu dan mengawasi anaknya dari luar kelas. Anak-anak yang ibunya berada di luar kelas, tak jarang mereka juga keluar-masuk kelas.

Bu Imah sebenarnya juga mengeluhkan kondisi ini. Pertama dirinya menganggap bahwa jika seorang anak diawasi terus-menerus, tidak akan berakibat baik bagi tumbuh dan berkembangnya kemandirian anak karena dalam proses belajar selalu dibantu oleh ibunya. Kedua, "hadir"-nya ibu-ibu di dalam ruang kelas membuat para guru tidak leluasa dalam mengajar. Artinya, ada nuansa "ketidakpercayaan" dari para ibu-ibu orang tua anak terhadap guru-guru di TK tersebut. Hal ini penting mengingat pernah terjadi peristiwa konflik antara orang tua murid dan guru. Ibu dari anak yang bersekolah di TK tersebut merasa tersinggung ketika salah seorang guru dinilai "terlalu keras" kepada anaknya ketika proses belajar berlangsung. Memang, para guru yang mengajar di TK Intan Bahari bukan seorang guru lulusan pendidikan keguruan anak usia dini. Para guru di sana belum belajar masalah-masalah pedagogi, kecuali Bu Imah yang saat ini sedang menempuh pendidikan tingginya di salah satu universitas di Kabupaten Indramayu. Sementara guru lainnya, seperti Bu Nur dan Bu Ayu, hanya lulusan SMA yang "merasa terpanggil" untuk mengajar di TK tersebut.

Tak jarang Bu Imah sebagai kepala sekolah menggunakan "uang pribadi" rumah tangganya untuk biaya operasional TK. Uang tersebut didapat dari suami Bu Imah yang bekerja sebagai guru di salah satu madrasah setingkat sekolah menengah pertama di Kabupaten Indramayu. Sama seperti biaya operasional dari pemerintah daerah yang tidak turun setiap bulan, gaji suami Bu Imah pun juga diterimanya setiap tiga bahkan enam bulan sekali. Memang sekali menerima gaji jumlahnya besar, namun dalam satu-dua minggu banyak habis untuk keperluan operasional TK Intan Bahari.

"Uang rumah tangga" tersebut selain untuk keperluan operasional TK, juga untuk gaji guru-guru di TK tersebut. Bu Imah tidak berani memberikan uang yang diterimanya dari pemerintah daerah untuk gaji guru karena hal tersebut tidak dibenarkan, selain memang karena jumlahnya tidak mencukupi. Maka, gaji "informal" yang diberikan Bu Imah kepada guru-guru di TK nya tersebut berasal dari uang gaji suaminya. Jumlahnya sekitar Rp. 300.000,- dan itu diberikan setiap tiga bulan. Tak jarang jika uang suami habis atau biaya untuk kebutuhan rumah tangga meningkat, Bu Imah harus mengutang ke berbagai pihak untuk menutupi biaya rumah tangga dan juga biaya operasional TK, termasuk biaya gaji guru.

Lembaga pendidikan kanak-kanak lain adalah PAUD Mutiara Bahari. PAUD ini memiliki dua kelas (dua rombongan belajar), yaitu kelas A dan kelas B. Berbeda dengan TK Intan Bahari yang kedua kelas berada di sebuah gedung, satu kelas di PAUD Mutiara Bahari tidak menempati sebuah gedung, melainkan memanfaatkan tempat parkir balai desa. Setiap pagi, salah seorang guru, Bu Uswah, datang lebih pagi untuk menggelar alas dan menyiapkan papan tulis

untuk kelas B, kelas yang menempati tempat parkir tersebut. Jumlah murid di PAUD ini adalah 54 anak. Sedikit berbeda dengan TK Intan Bahari yang mendapat biaya operasional (meskipun jarang dan tidak menentu), biaya operasional PAUD Mutiara Bahari berasal dari anggaran pemerintah desa yang kecil jumlahnya dan tidak menentu pula.

Baik Bu Imah, Bu Incih, serta para guru yang mengajar di TK Intan Bahari dan PAUD Mutiara Bahari telah menyadari bahwa mereka tidak bekerja di masyarakat yang memiliki latar belakang sosial ekonomi yang baik, meskipun mayoritas guru-guru tersebut memiliki latar belakang sosial ekonomi yang dapat dikatakan lebih baik dari masyarakat lainnya. Bu Imah misalkan, saat ini sedang mengenyam pendidikan kuliah di Universitas Terbuka Kabupaten Indramayu untuk tujuan “mengejar” sertifikasi, sementara itu Bu Incih, memiliki seorang anak yang tengah menempuh pendidikan tinggi di salah satu perguruan tinggi terkemuka di Bandung. Bu Ayu, guru di TK Intan Bahari, meskipun belum menikah dan tidak kuliah, merupakan seorang lulusan SMA yang memiliki kemampuan membaca dan menulis yang baik. Demikian juga dengan Bu Uswah, yang memiliki seorang suami sebagai pedagang dan memiliki tanah cukup luas, meskipun tidak mengenyam bangku kuliah, dirinya memiliki pengetahuan untuk dibagikan ke anak-anak, dan dirinya juga memiliki kemampuan untuk mengajar. Mungkin ada beberapa orang yang dapat membaca dan menulis, meskipun terbatas. Namun demikian, tidak banyak dari mereka yang memiliki “keuletan dan kesabaran” dalam mengajar dan menghadapi anak-anak, tentunya dengan orang tua mereka yang turut ikut di dalam kelas.

Dalam relasi sosial, para guru tersebut tidak memisahkan diri dari interaksi sehari-hari dengan warga lainnya dalam sebuah komunitas kampung. Interaksi antarmereka terbentuk atau terjadi misalkan ketika berbelanja di pedagang sayuran ketika pagi hari, duduk-duduk santai ketika sore hari, menjenguk orang sakit, pergi ke mushola atau masjid, dan lain sebagainya. Pernah suatu ketika saya menemui Bu Uswah yang tinggal di Blok Karang Kaji, pada suatu sore sedang duduk-duduk santai bersama ibu-ibu di Blok Pancer Pindang, sebuah blok yang jaraknya lumayan jauh dari Blok Karang Kaji. Mereka tampak mengobrol santai menikmati sore hari. Beberapa ibu-ibu yang saya temui adalah orang tua dari anak-anak yang diajar Bu Uswah di PAUD Mutiara Bahari.

- **Struktur Kampung dan “Rumah Kediaman”**

Seperti yang telah saya kemukakan di bagian pendahuluan, bahwa tulisan dan terutama bagian analisis ini ditujukan untuk menjawab mengapa gejala di atas dapat terjadi, yaitu gejala “kebersediaan” ibu-ibu rumah tangga untuk menjadi

guru di TK/PAUD tanpa dibayar tinggi (bahkan tidak dibayar salam sekali) mengingat diri mereka bukan bagian dari organisasi PKK. Langkah pertama untuk menyelidiki gejala tersebut adalah dengan memperhatikan struktur sosial budaya dari pemukiman masyarakat di Desa Cangkring. Beberapa informan saya sendiri dalam beberapa wawancara menyatakan bahwa dirinya adalah “orang kampung”, yang secara langsung menunjukkan bahwa diri dan golongan mereka berbeda dari orang di luar Desa Cangkring, khususnya terhadap mereka yang tinggal di perkotaan, baik dalam hal struktur fisik maupun “struktur perasaan”. Ketika orang dalam lingkungan kampung itu sendiri yang menggunakan istilah “kampung”, itu berarti keakraban dan kenyamanan dengan suatu gaya hidup tertentu, yang didasari pengamatan atas sejumlah perilaku yang berulang secara khusus. Orang-orang kampung dianggap terlibat dalam hidup satu sama lain, entah sebagai penjaga kaidah-kaidah moral lingkungan atau sebagai rekanan pelaku dalam berbagai kegiatan setempat, entah baik entah buruk (Newberry 2016: 92-93).

Pembicaraan mengenai kampung lazimnya memang cenderung dekat dengan lingkungan perkotaan, yaitu sebuah pemukiman padat penduduk yang ada di tengah-tengah kota. Dalam konteks Indonesia, pengertian kampung sendiri sangat kompleks. Kampung bisa berarti merujuk tentang tata ruang pemukiman (struktur fisik), unit administrasi pemerintah di tingkat lokal, bahkan juga merujuk pada sifat atau mental, “*kampungan*”. Di bagian ini, istilah “kampung” yang saya maksud adalah merujuk pada aspek perasaan masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Meskipun istilah *wong kampungan* (bahasa Jawa), atau orang dengan mentalitas kampung, memiliki konotasi merendahkan dari kacamata mereka yang tinggal di kawasan perkotaan yang lebih baru atau di kompleks perumahan, tetapi bagi warganya kampung berarti rasa aman, hubungan bertetangga yang rukun, dan sebuah kediaman (*home*) yang terbentuk melalui kegiatan interaksi dan pertukaran setiap hari. (Newberry 2013: 30)

Tinggal di kampung memberikan “suasana” tersendiri dalam proses penelitian. Itulah mengapa saya menyatakan bahwa kampung tidak hanya sebagai “arsitektur fisik” tetapi juga “arsitektur sosial”. Artinya, dari sepanjang jalan Cangkring misalkan, atau di sudut-sudut tempat ibu berbelanja sayuran, lapangan tempat anak-anak bermain, mushola tempat orang-orang dewasa hingga anak-anak mengaji, di gang-gang, di muka pintu, di situ semua terjadi interaksi yang berarti. Membicarakan kampung, tidak berhenti sampai pembicaraan mengenai struktur ruang atau bangunan taman kanak-kanak yang berukuran 5 x 10 meter yang dikelilingi dengan dinding terbuat dari bata, semen, dan dicat putih, atau rumah-tumah yang dipisahkan dengan pagar, pintu-pintu yang terbuka sepanjang hari, lapangan yang selalu ramai di pagi dan sore hari. Dengan “membongkar” dinding-dinding yang mengelilingi

taman kanak-kanak, pagar-pagar yang membatasi rumah-rumah, serta “menerobos” masuk pintu-pintu yang terbuka, kita dapat menyelidiki interaksi antarwarganya. Dengan memperhatikan aspek interaksi warga dalam alam atau struktur kampung, penjelasan-penjelasan bisa didapatkan. Masyarakat kampung diikat dan disatukan lebih dari satu cara: lewat arsitektur jalan-jalan dan dinding-dinding, lewat bentuk-bentuk pengorganisasian komunitas, seperti ronda; lewat pengelolaan administratif oleh pejabat daerah, namun juga lewat mode perbapakain, interaksi, dan relas-relasi sosial (Newberry 2016: 92).

Pada suatu siang yang terik, saya dan Bu Siti sedang memotong kecil-kecil ikan teri yang nantinya akan disetor ke penimbang. Kegiatan memotong ikan kecil-kecil ini menjadi kesibukan bagi kesibukan mayoritas ibu-ibu di sana untuk menambah penghasilan keluarga. Pembicaraan di antara ibu-ibu saat bekerja memotong ikan teri itu adalah pembicaraan tentang orang-orang di sekitar mereka. Bahkan, bisa dikatakan sebagai kegiatan *menggosip*. Di sini, terjadi peleburan pembicaraan antara yang privat dan publik. Pembicaraan mengenai “internal keluarga” bisa juga menjadi bahan pembicaraan padahal diantara mereka ada orang lain yang bukan anggota keluarganya. Inilah yang saya maksud dengan, bahwa berbicara soal kampung, kita mesti “menerobos” dinding-dinding atau pagar-pagar yang saling membatasi antarrumah. Isu penting dalam membicarakan kampung tak lain adalah soal interaksi itu sendiri yang khas, yang membedakan dari interaksi orang-orang yang tinggal di kompleks perumahan yang cenderung tertutup satu sama lain.

Dengan interaksi yang khas itu, kehidupan kampung di satu sisi memberikan rasa aman dari modernitas kehidupan di luar, kenyamanan di dalam, dan mengutamakan pola-pola perilaku tolong-menolong dan tenggang rasa. Namun demikian, di lain itu kampung juga dapat berarti pengawasan yang ketat dan penuh curiga oleh tetangga dan kerabat. Bu Siti dan ibu-ibu rumah tangga lain yang tinggal di sekitar rumah Bu Siti, adalah ibu-ibu yang anak-anaknya bersekolah di TK yang sama, yaitu TK Intan Bahari. Implikasinya, jika terjadi hal yang “tidak sepatutnya” di TK, akan menjadi bahan pembicaraan bagi ibu-ibu di teras rumah Bu Siti, sembari memotong ikan kecil-kecil. Kasus Bu Ayu menjadi gambaran mengenai hal ini. Bu Ayu, tak entah sengaja atau tidak bersikap keras terhadap seorang anak di kelas B, membuat ibu dari anak tersebut tersinggung, dan pada hari yang sama, di hadapan ibu-ibu yang lain, ibu dari anak tersebut menegur dengan keras sikap Bu Ayu. Akibatnya, Bu Ayu menjadi bahan pembicaraan ibu-ibu di teras-teras rumah selama dua minggu, bahkan lebih.

Persoalannya, mengapa ini bisa terjadi? Interaksi memang menjadi satu hal penting dalam ruang sosial budaya kampung, namun interaksi tersebut bukan

satu-satunya hal. Merujuk pada kutipan dari Newberry di bagian awal sub bab ini, satu hal lain yang juga penting selain interaksi adalah pertukaran. Hal yang menguat dari interaksi dan pertukaran setiap hari, adalah rasa ada batas-batas yang tak kasat mata, yaitu batas-batas “perbedaan’ sosial yang membedakan warga di dalam kampung dengan orang-orang di luar kampungnya. Dengan kata lain, rasa berbeda dengan dunia luar dan rasa bersatu ke dalam. Ibu-ibu meskipun dalam beberapa minggu menjadikan Bu Ayu sebagai bahan pembicaraan mereka, dan pembicaraan mereka itu mengarah kepada hal-hal yang kurang baik tentang Bu Ayu, namun ibu-ibu tersebut tetap membutuhkan Bu Ayu sebagai sosok guru untuk anak-anak mereka.

Interaksi, pertukaran, rasa berbeda keluar, dan rasa bersatu ke dalam, menjadikan kampung bukan hanya sebagai rumah (*house*) bagi masyarakatnya, tetapi juga kediaman (*home*). Jika pengertian kampung yang kita rujuk adalah mengenai persoalan fisiknya, yaitu pemukiman padat penduduk, maka jelas Desa Cangkring tidak tergolong ke dalam pengertian ini karena struktur fisik atau tata ruang pemukiman di Desa Cangkring tidaklah padat.

Walaupun kampung selama ini dipahami sebagai pemukiman padat kelas menengah ke bawah di Jawa, kampung juga sering didefinisikan sebagai pemetaan sosial berdasarkan pengalaman dan persepsi warga dalam kehidupan mereka sehari-hari. (Newberry 2013: 47)

Memahami kampung sebagai kediaman bagi warganya, seperti menganalogikan kehidupan keluarga di dalam rumah dengan kehidupan masyarakat di kampung itu sendiri: keakraban, kerja sama, persahabatan, dan tolong menolong. Itulah mengapa, Bu Imah, juga dapat menangis ketika ada seorang muridnya menangis karena baru saja ditinggal ibunya yang bercerai dengan suaminya. Bu Imah, di luar posisinya sebagai guru dari anak tersebut, juga merasa bahwa dirinya sebagai “ibu” dari anak tersebut. Juga misalkan, guru-guru di TK Intan Bahari yang berbondong-bondong menjenguk murid-muridnya yang sakit. Murid-murid yang sakit itu seringkali hanya tinggal bersama nenek dan/atau kakeknya di rumah. Guru-guru itu merasa mereka seperti ibu dari murid-muridnya.

Hal lain yang juga tercermin tentang “analogi” rumah dalam artian kediaman dengan masyarakat kampung berasal dari cerita Bu Imah yang ingin mendirikan yayasan dan mencarikan donor untuk anak-anak di Desa Cangkring. Bu Imah memiliki cita-cita untuk mengajak orang-orang kaya di Desa Cangkring maupun di luar Desa Cangkring untuk turut menyumbangkan sebagian rezekinya untuk anak-anak yatim di Desa Cangkring. Selama ini, Bu Imah mengeluarkan sendiri uang “pribadi”nya untuk keperluan publik, yaitu

anak-anak yatim yang ada di Desa Cangkring, sedangkan Bu Imah sendiri bukan termasuk orang yang kaya raya.

Gambaran tentang masyarakat yang seperti ini juga dapat kita temukan dari karya etnografi klasik Jawa yang ditulis oleh Clifford Geertz (1963) dan Hildred Geertz (1961). Clifford Geertz menyampaikan tentang berbagi-kemiskinan (*shared poverty*), sebagai gambaran dari kehidupan masyarakat perkampungan di Jawa. Warga kampung tersebut adalah orang-orang dari kelas menengah ke bawah dan warga miskin yang berbagi sumber daya: tenaga, pikiran, dan terutama materi yang tidak seberapa serta menjunjung tinggi hubungan sosial dan pertukaran antartetangga. "Kemiskinan kolektif" menyebabkan perlunya pengaturan sedemikian rupa di antara mereka sendiri secara meluas untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh bagian (rejek) secara adil. Inilah pada prinsipnya fungsi gotong royong yang merupakan tradisi budaya di banyak pedesaan (dan perkampungan) di Jawa. Gagasan gotong royong ini menyatu dalam berbagai ranah kebudayaan dan institusi, dari tingkat lokal hingga nasional (Geertz, 1963; Geertz 1961).

Di kampung manapun di Jawa, tetap ada ideologi lokal yang mengesankan bahwa masyarakat tinggal dalam suasana dan hubungan saling tolong-menolong dan mendukung satu sama lain. Berbicara soal warga kampung berarti juga berbicara soal sikap memikul beban bersama dan memberikan bantuan kepada tetangga. Oleh karena itu, kampung dilihat sebagai "ekonomi moral" (Scott 1985). Membicarakan kampung sebagai rumah kediaman, kita tidak bisa meninggalkan apa yang telah ditulis Raymond Williams mengenai *structure of feeling* (struktur perasaan). Bagian itu merupakan salah satu bagian dalam bukunya yang berjudul *Marxism and Literature* (1977).

Kelas kampung dibentuk secara mendalam lewat peranan ekonominya dalam perekonomian Indonesia, namun juga oleh bentuk-bentuk kesadaran praktis yang menjangkau secara luas sekaligus mereproduksi posisi kelas ini dan menghasilkan struktur perasaan yang bertahan cukup lama (Williams 1977). Konsep "struktur perasaan" William menyatakan bahwa kesadaran mengenai kehidupan kampung dapat terwujud melalui tindakan-tindakan aktif dalam hubungan yang nyata antarwarganya. Jadi, hal-hal seperti sikap tolong-menolong, tenggang rasa, dan sebagainya yang menjadi nilai ideal bagi kehidupan warga kampung, tidak berada semata-mata di awang-awang. Semuanya itu nyata dan dilakukan dalam bentuk tindakan nyata. *For structures of feeling can be defined as social experiences in solution, as distinct from other social semantic formations which have been precipitated and are more evidently and more immediately available* (Williams 1977: 133-134). Pernyataan Williams tersebut berarti bahwa imajinasi dan struktur perasaan tentang kampung tidak dibentuk

oleh pengalaman yang sudah berlalu, tetapi melalui pengalaman sehari-hari yang sedang berproses. Oleh karena itu, menurut Williams, sangat mungkin terjadi ketegangan antara pengalaman yang telah berjalan dan pengalaman praktis di masa kini.

- **Beban Moral dan Tekanan Tidak Langsung dari Masyarakat**

Masyarakat kampung yang di dalamnya terdapat pola interaksi tolong menolong atau saling membantu tentu memosisikan suatu pihak sebagai “penolong”, sedangkan yang lainnya adalah pihak yang ditolong. Kehendak atau motivasi untuk menolong seringkali berasal dari dalam diri penolong tersebut karena rangsangan dari luar, biasanya berasal dari rasa iba atau rasa bahwa dirinya memiliki sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih tersebut bisa berupa tenaga, pikiran, dan khususnya materi. Bu Incih misalkan, memiliki seorang anak yang sedang mengenyam bangku perkuliahan. Di Desa Cangkring sendiri, orang yang bisa mengenyam bangku di perguruan tinggi bisa dikatakan sangat sedikit, tidak lebih dari 10 orang. Selain itu, suami Bu Imah juga pernah mengenyam pendidikan tinggi di Malaysia. Dengan tidak banyaknya warga kampung yang dapat mengenyam bangku perkuliahan, orang-orang yang memiliki pengalaman tersebut, atau setidaknya anggota dari keluarga intinya yang berkesempatan untuk kuliah, membuat diri mereka dipandang sebagai orang yang memiliki “kelebihan”.

Kelebihan-kelebihan yang meskipun tidak seberapa tersebut secara tidak langsung memosisikan diri mereka (ibu-ibu rumah tangga) untuk merasa perlu berbagi dengan tetangga-tetangganya. Namun demikian, bagaimana dengan guru-guru yang tidak pernah atau tidak ada anggota di keluarga intinya yang pernah mengenyam bangku kuliah? “Level” kelebihan kedua, adalah mereka yang mampu membaca dan menulis dengan baik, serta memiliki kemampuan untuk mengajar dan mendidik anak. Di Desa Cangkring, kaum perempuan yang memiliki kemampuan membaca dan menulis cukup banyak, namun tidak semua dari mereka dipandang mampu menjadi guru. Penilaian seseorang untuk mampu atau tidak mampu menjadi guru juga diberikan oleh masyarakat itu sendiri, penilaian itu tentunya terjadi secara tidak langsung, yaitu melalui perbincangan-perbincangan “informal” di teras-teras rumah.

Motivasi dari dalam diri yang lainnya yang terkait dengan moralitas adalah penjelasan dalam kaitannya dengan naluri-alamiah keibuan. Dalam hal ini, kita bisa terlebih dahulu menilik etnografi *Death without Weeping* karya Scheper Hughes (1992) yang bercerita tentang (*m*)other love. Diceritakan bahwa ketika ibu-ibu di perkampungan Bom Jesus bekerja di perkebunan dan harus meninggalkan rumah dan meninggalkan anak, mereka percaya bahwa ada ibu-ibu lain, entah kerabat atau tetangganya yang akan menjaga anak-anak mereka

tersebut. Hal serupa dapat dikatakan juga terjadi di Desa Cangkring. Penjelasan-penjelasan yang bersifat biologis (karena naluri keibuan) ini, di satu sisi tidak bisa kita hindari sama sekali karena juga berkaitan dengan moralitas perempuan, terutama di perkampungan. Kondisi ini kemudian memosisikan perempuan sebagai sosok malaikat yang erat kaitannya dengan hal-hal seperti mengasuh, membesarkan, menjaga, dan berkorban bukan hanya bagi anak dan keluarganya di rumah, tetapi juga di masyarakatnya. Posisi ibu seperti inilah yang melahirkan konsep “peran ganda perempuan”.

Menurut Suryakusumah, Ibu dalam konteks pemahaman Indonesia memiliki pengertian yang begitu luas, lebih dari sekadar pengertian biologis. Sekalipun seorang perempuan tidak memiliki anak, perempuan yang memiliki kedudukan sosial penting, perempuan yang memiliki keahlian mengobati, kekuatan spiritual, perempuan kaya, hingga perempuan tua, bisa disebut dengan “ibu”. Konsep ibu meskipun berasal dari keibuan biologis, telah diperlebar lebih luas. Pengertian seperti ini operasional pada apa yang saya amati dalam penelitian pendahuluan. Bagi guru-guru di PAUD/TK di Desa Cangkring, mereka menganggap diri mereka adalah ibu bagi anak-anak yang belajar di sana, terutama bagi anak-anak yang ibu secara biologisnya pergi ke luar negeri untuk bekerja sebagai TKW. Berdasarkan pengakuan seorang ibu rumah tangga yang menjadi guru PAUD/TK di sana, mereka mengaku memberikan perhatian pada murid-muridnya seperti pada anak-anaknya sendiri. Hal ini (menurut pengakuan saat wawancara juga) tercermin ketika seorang anak yang barusaja orang tuanya bercerai dan menangis, guru tersebut langsung memeluk bagaikan anaknya sendiri. “*Kasian.. saya kasian pada mereka, saya bayangkan kalau ini terjadi pada anak saya*”, ungkap Bu Imah dalam sebuah wawancara.

Moral untuk mengabdikan kepada masyarakat perlu digarisbawahi sebagai inisiatif oleh diri sendiri, bukan oleh PKK. Demikian juga yang dialami dan disampaikan oleh Bu Imah kepada guru-guru di TK Intan Bahari. Tampaknya, tidak aktifnya organisasi PKK di bidang pendidikan membuat ibu-ibu rumah tangga yang dibujuk oleh para agen (Bu Incih dan Bu Imah) merasa tergerak untuk membantu keduanya dalam mengelola PAUD Mutiara Bahari dan TK Intan Bahari.

Layaknya keluarga, masyarakat di Desa Cangkring pun juga bisa dianalogikan sebagai keluarga. Bu Imah, dalam hal ini bisa kita lihat sebagai “ibu” dari anak-anak yang banyak ditinggal pergi oleh ibu kandung mereka, bahkan bagi ibu-ibu yang masih ada dan mengawasi anak-anaknya di TK. Sosok Bu Imah yang lekat dengan identitas guru menjadi signifikan dalam hal ini. Sebagai seorang “ibu” dia layak untuk didengar oleh anak-anak, dan juga oleh ibu-ibu orang tua

atau wali dari murid-muridnya. Hal ini tercermin dari persoalan persiapan imunisasi Rubela. Suatu hari, Bu Imah tidak masuk mengajar karena sedang mengikuti sosialisasi mengenai imunisasi Rubela di Kabupaten Indramayu. Saya sempat bingung dalam melihat pertautan antara imunisasi dan TK. Bukankah imunisasi adalah ranah dari Puskesmas atau Posyandu? Peran guru tersebut membuat Bu Imah menjadi sosok yang dapat dipercaya sehingga dapat didengarkan oleh ibu-ibu orang tua murid, bahkan jika dibandingkan dengan petugas atau kader Posyandu itu sendiri. Pemosisian seperti ini oleh para ibu orang tua murid, membuat Bu Imah tampak memiliki "beban moral" di masyarakat, terutama untuk selalu menjadi pendidik dan pengajar bagi anak-anak di sana.

Kejadian-kejadian sehari-hari dalam struktur kehidupan kampung tidak hanya mencerminkan nilai-nilai dan makna masyarakat bagi warga kampung, tetapi juga peran kaum perempuan dalam menerapkan nilai-nilai tersebut. Persoalan beban moral kemudian memosisikan perempuan sebagai apa yang disebut "*social housekeeper*". Penyebutan ini kemudian menuntut kaum ibu rumah tangga yang menjadi guru untuk menjadi "warga kampung, khususnya perempuan, yang baik". Salah satu indikator perempuan kampung yang baik adalah mereka yang dapat memberikan kontribusinya kepada warga kampung lainnya.

Penjelasan kedua selain karena persoalan beban moral adalah penjelasan yang berasal dari luar diri guru-guru itu sendiri, yaitu karena tekanan masyarakat. Tekanan dari masyarakat yang saya maksud di sini adalah tekanan yang terjadi secara tidak langsung, sekali lagi, yang terjadi atau terbentuk melalui interaksi sehari-hari. Konteks pertama yang harus saya sampaikan dalam membicarakan mengenai tekanan ini adalah perihal bahwa terdapat peraturan "anak wajib menyertakan ijazah TK/PAUD ketika mendaftar ke sekolah dasar" yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu. Banyak di daerah lain di Jawa, seperti di Tegal dan Brebes yang pernah saya kunjungi, pemerintah daerah tidak mewajibkan anak-anak di sana untuk TK atau PAUD sebelum mendaftar ke sekolah dasar. Akibatnya, hanya beberapa saja orang tua yang menyekolahkan anaknya ke TK atau PAUD karena merasa itu bukan kewajiban. Konsekuensi lainnya, banyak anak-anak di daerah itu ketika duduk di bangku sekolah dasar, kurang atau bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis.

Lain halnya dengan yang terjadi di Kabupaten Indramayu, khususnya di Desa Cangkring. Mau tidak mau, peraturan tersebut membuat para orang tua di sana menyekolahkan anaknya ke TK atau PAUD. Persoalannya, adakah yang sanggup mengajar? Mengingat kemampuan membaca dan menulis orang-orang

di Desa Cangkring juga tidak begitu tinggi. Tidak hanya itu, jika ada yang memiliki kemampuan membaca dan menulis, mampukah mereka menjadi guru bagi anak-anak di sana dan mengajari mereka untuk membaca dan menulis? Situasi ini membuat orang-orang yang memiliki kemampuan membaca dan menulis, serta dipandang oleh masyarakat cocok atau mampu menjadi guru, entah karena pengalaman dan latar belakang pendidikannya, tergerak untuk menjadi guru bagi anak-anak di sana. Penilaian masyarakat adalah sebuah bentuk kepercayaan bagi ibu-ibu rumah tangga yang menjadi guru TK/PAUD di Desa Cangkring. Selain sebagai beban moral, kepercayaan tersebut di sisi lain adalah “tekanan” secara tidak langsung.

Lingkungan kampung dideskripsikan sebagai situs reproduksi cadangan tenaga kerja murah, sebagiannya berkat program-program kesejahteraan sosial dengan ciri kesukarelaan dari pekerja perempuan. Program-program semacam PKK yang dilaksanakan oleh bentuk-bentuk administrasi lokal sebagai pelayan sosial, yang dikombinasikan dengan cita-cita komunitas rumah yang suportif pada gilirannya mendukung reproduksi pekerja untuk masyarakat (Newberry dalam Klinken, 2016:90). Nilai ideal saling tolong menolong, atau gotong royong, dan nilai komunitas berupa kewajiban untuk saling menghormati dan mendukung merupakan bagian-bagian kunci dari identitas kampung. Satu hal yang utama adalah bahwa retorika saling tolong menolong dalam komunitas ini mengesahkan reproduksi para penganggur terselubung dan pengangguran, bahkan melegitimasi kerja berbasis gender untuk perempuan guna mendukung keluarga dan komunitas mereka (Newberry 2016: 92).

Model tekanan “tidak langsung” dari masyarakat ini membedakan dengan model tekanan “langsung” seperti dari hasil penelitian saya tentang tema serupa di Malang, Jawa Timur. Ibu-ibu rumah tangga yang menjadi kader Posyandu di sebuah kelurahan merasa wajib untuk mengerjakan tugas-tugasnya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di tingkat lokal, segala macam sosialisasi, dan menyelesaikan data-data atau dokumen laporan untuk dikumpulkan ke dinas kesehatan kota. Perasaan untuk wajib mengerjakan semua tugas tersebut tidak dapat dilepaskan dari adanya SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan oleh Wali Kota Malang untuk mengangkat ibu-ibu rumah tangga kader Posyandu tersebut untuk menjadi kaki-tangan resmi pemerintah dalam pelayanan kesehatan di tingkat lokal. Dengan adanya SK, ibu-ibu tadi menerima sejumlah insentif, meskipun jumlahnya tidak besar (Rp. 300.000,- per 3 bulan), namun sangat berarti bagi mereka. Jika ibu-ibu kader Posyandu tersebut tidak mengumpulkan laporan setiap bulan dengan baik, maka insentif tersebut tidak akan diberikan. Di sini kita memperoleh catatan penting bahwa insentif menjadi alat penekan secara langsung kepada ibu-ibu untuk menjalankan perannya sebagai kader Posyandu dengan baik.

Jika membicarakan soal bayaran, ibu-ibu rumah tangga yang menjadi guru di TK Intan Bahari tidak mendapat bayaran resmi dari pemerintah. Bayaran itupun diperoleh dari Bu Imah sendiri, yang itupun diambilkan dari uang pribadi atau uang rumah tangga Bu Imah. Pertama, selain untuk menjaga motivasi para guru agar mau terus mengajar meskipun tidak memiliki sistem pembayaran yang jelas, uang pribadi dari Bu Imah tersebut juga untuk alat kontrol Bu Imah terhadap bawahannya. Jadi, selain tekanan tidak langsung itu datang dari ibu-ibu orang tua murid yang meskipun tidak rutin membayar iuran namun berada di dalam kelas untuk mebgawasi anak dan juga guru, tekanan tidak langsung itu juga datang dari Bu Imah sebagai kepala sekolah yang juga memberikan uangnya kepada para guru. Hal ini membuat para guru relatif “patuh” terhadap kepala sekolah. Sifat pemberian uang dari Bu Imah kepada para guru berbeda dari sifat pemberian uang dari pemerintah ke ibu-ibu rumah tangga kader Posyandu di Malang. Pembeda dari keduanya adalah “syarat dan ketentuan” yang diberlakukan. Jika insentif yang diterima para kader Posyandu di Malang itu disertai oleh persyaratan tertulis yang wajib dipenuhi, maka tidak demikian halnya dengan para guru di TK Intan Bahari. Tidak ada persyaratan dari Bu Imah yang secara resmi mengikat. Ikatan itu bersifat “kultural”, oleh karenanya saya menyebutnya sebagai tekanan “tidak langsung”.

Membaca “tekanan tidak langsung” ini dapat kita telusuri dari interaksi sehari-hari di antara warga kampung. Pendekatan pada interaksi sehari-hari ini menelusuri interaksi antara standar tindakan, perilaku dan penilaian yang mengungkapkan kesepakatan-kesepakatan tersirat atau yang diterima begitu saja. Garfinkel menjelaskan perhatian kepada interaksi-interaksi ini sebagai:

Memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan-kegiatan yang paling lumrah dalam kehidupan sehari-hari dari pada peristiwa-peristiwa yang luar biasa [...] kegiatan warga untuk membangun dan mengelola tempat kegiatan sehari-hari sama dengan cara-cara yang digunakan warga untuk membuat tempat tersebut dapat dipertanggungjawabkan (Garfinkel 1967: 1)

Menurut Garfinkel, interaksi sehari-hari di masyarakat berhubungan erat dengan persoalan pertanggungjawaban, khususnya bagi kaum perempuan sebagai agen dan aktor pembangun masyarakat setempat. Praktik-praktik kehidupan sehari-hari dalam alam moral kampung menjadi penting artinya untuk memahami posisi perempuan dalam lingkup masyarakat.

Membaca Garfinkel, interaksi sehari-hari yang dimaksudnya dapat kita lihat dari interaksi antara ibu-ibu orang tua murid di Desa Cangkring, atau interaksi antara guru dan ibu orang tua murid. Ketika ada sekumpulan ibu-ibu orang tua murid di teras rumah Bu Siti dan sedang membicarakan tentang Bu Ayu yang

tidak berlaku sebagaimana mestinya kepada murid, di situlah “pertanggung-jawaban” Bu Ayu dipertaruhkan. Meskipun tidak ada Bu Ayu di teras rumah tersebut, dalam struktur kampung, pembicaraan atau gosip semacam itu pada kurun waktu yang tidak lama juga akan sampai ke telinga Bu Ayu. Menjadi buah bibir ibu-ibu orang tua murid merupakan tekanan tidak langsung bagi Bu Ayu. Sebenarnya, sebelum menerima tekanan tidak langsung tersebut Bu Ayu telah menerima tekanan langsung, yaitu ketika ibu orang tua murid yang menerima perlakuan tidak semestinya menegur secara langsung kepada Bu Ayu. Jika persoalan tekanan masyarakat dikaitkan dengan struktur kampung, peristiwa digosipkannya Bu Ayu tersebut mencerminkan beberapa hal. Pertama, menjelaskan bahwa para tetangga, khususnya kaum perempuan, saling mengawasi kelakuan masing-masing.

4. Kesimpulan

Fenomena kebersediaan ibu-ibu rumah tangga di Desa Cangkring untuk mau menjadi guru di TK Intan Bahari dan PAUD Mutiara Bahari tidak dapat dilepaskan dari struktur Desa Cangkring sebagai masyarakat kampung. Kampung adalah sebuah bentuk kesadaran kelas. Dalam banyak cara, kesadaran kampung secara fundamental terbagi jadi dua: menatap ke depan menuju urbanisme modern sekaligus secara bersamaan menengok ke belakang sambil bernostalgia tentang hidup yang silam di desa yang berarti penuh dengan retorika tolong-menolong dan gotong royong. Aspek yang disoroti dari masyarakat kampung adalah struktur sosial dan perasaan-nya. Implikasinya, rumah-rumah, gang-gang, dan lorong-lorong kita lihat sebagai arena interaksi dan pertukaran. Di sini, kampung tidak hanya dilihat sebagai kumpulan rumah tangga, tetapi lebih kepada sebuah kediaman (*home*) bagi masyarakat yang tinggal di dalamnya. Konteks di atas menjadi penting dan relevan untuk menjelaskan fenomena kebersediaan ibu-ibu rumah tangga di Desa Cangkring untuk mau menjadi guru di TK/PAUD di Desa Cangkring, yaitu karena beban moral dalam diri guru tersebut dan tekanan secara tidak langsung dari masyarakat.

Dua penjelas tersebut tampak merupakan “dualisme” dari pemahaman terhadap kampung, yaitu antara menatap urbanisme serta tekanan-tekanan dari luar dan pengalaman hidup masa lampau yang penuh dengan retorika saling membantu. Di satu sisi, ibu-ibu rumah tangga yang mau menjadi guru tersebut memang bersedia karenadirinya memang merasa perlu membantu. Rasa perlu membantu ini tak lepas dari kondisi anak-anak di Desa Cangkring yang banyak ditinggal oleh orang tua kandungnya sehingga tidak ada yang mendampingi anak dalam belajar. Di sisi lain, mereka bersedia karena kondisi masyarakat yang secara tidak langsung menekan, baik menekan agar ibu-ibu rumah tangga

yang memiliki kemampuan untuk mau menjadi guru, maupun tekanan dalam proses ibu-ibu tersebut menjadi guru. Kembali ke istilah “ibuisme” itu sendiri, ibuisme yang seringkali kita pahami selama ini adalah konstruksi sosial negara (dimulai sejak rezim Orde Baru) terhadap kaum perempuan ibu rumah tangga melalui organisasi PKK. Namun demikian, PKK atau organisasi perempuan lainnya bukan satu-satunya penyebab kaum perempuan ibu rumah tangga “bergerak” untuk menyejahterakan masyarakatnya sendiri, melainkan juga struktur perasaan kampung yang membuat kaum perempuan ibu rumah tangga merasa memiliki kewajiban untuk membantu masyarakatnya sendiri.

5. DaftarPustaka

- Antlov, Hans. (2002). *Negara dalam Desa: Patronase Kepemimpinan Lokal*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama
- Djajadiningrat, Madelon. (1992). “Ibuisms and Priyayization: Path to Power?” dalam Locher-Scholten, E. & A. Niehof (peny.) *Indonesian Women in Focus*. Leiden: KITVL Press.
- Harold, Garfinkle., (1967). *Studies in Methodology*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall
- Geertz, Hildred. (1961). *The Javanese Family*. New York: Free Press of Glencoe
- Hughes, Nancy Scheper. (1989). *Death Without Weeping: The Violence of Everyday Life in Brazil*. Berkley: University of California Press
- Newberry, J. (1992). *Back Door Java: Negara, Rumah Tangga, dan Kampung di Keluarga Jawa*. Diterjemahkan oleh Bernadetta dan Masri Maris (2013). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Newberry, J. (2016). “Kelas Mobil: Sirkulasi Anak-anak dalam Membangun Indonesia Kelas Menengah” dalam Klinken, G. V. (peny.) *In Search of Middle Indonesia*. Diterjemahkan oleh Yuku Aditya. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Newberry, J. (2017). *Anything Can Be Used to Stimulate Child Development: Early Childhood Education and Development in Indonesia as a Durable Assemblage*. *The Journal of Asian Studies*. Hal. 1-21
- Newberry, J. (2017). *Interiority and Government of The Child: Transparency, Risk, and Good Governance in Indonesia*. *Journal of Global and Historical Anthropology* Vol. 77. Hal. 77-89
- Shiraishi, Saya Sasaki., (1997). *Pahlawan-pahlawan Belia: Keluarga Indonesia dalam Politik*. Diterjemahkan oleh Seno Gumira Ajidarma, dkk (2001) Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Suryakusumah, Julia. (1988). *Ibuisms Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Orde Baru*. Depok: Komunitas Bambu

- Suryaningsi, T. (2017). Ranger Pink: Perempuan Pekerja Tambang di Antara Dua Dunia. *Etnosia: Jurnal Etnografi Indonesia*, 2 (1). 19-39.
DOI: <http://dx.doi.org/10.31947/etnosia.v2i1.2959>
- Wicaksono, M. A. (2017). Ibuisme Masa Kini: Suatu Etnografi tentang Posyandu dan Ibu Rumah Tangga. *UMBARA Indonesian Journal of Anthropology*, 1(2).
- Williams, Raymond. (1977). "Structure of Feeling" dalam Steven Lukes (ed.). *Marxism and Literatures*. Oxford: Oxford University Press.